

UPAYA JEPANG DIBAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE DALAM MENINGKATKAN PERTAHANAN MILITER

Oleh
Ananda F Ayu

Abstract

This study describes how Japan's efforts to improve its military . The Japanese effort which will issue a policy in which Japan can actively participate in military activities. Japan has experienced many developments after the Cold War to become one of the most advanced military in East Asia . This is due to the encouragement of the US desire to keep the area from East Asia to North Korean military forces . National Defense Program Guidelines, 2010 brings a new change in the concept of the Japanese defense . The change lies in the existence of the concept of Dynamic Defense Force to replace the Basic Defense Force that has been used since the National Defense Program Outline in 1976. That is because Abe has a position and legitimacy are more powerful than ever , with the support of the LDP as a party majority control of parliament , and the level of acceptance of people who remain good. Defense policies that have been issued by Abe in the background backs regional conditions in East Asia increasingly unsafe . Mainly related to the growing concerns of the Japanese people of both countries. The conclusion that can be drawn is that with these efforts can enhance Japan 's defense -related millitary regional conditions in East Asia . It is also due to the support of the Japanese people towards security issues , including constitutional changes , will continue to grow in the future

Key Words : *Security, Dynamic Defense Force, Shinzo Abe, East Asia Conflict*

Pendahuluan

Jepang memiliki sejarah panjang sebelum era Perang Dunia dan Perang Dingin terjadi. Berakhirnya Perang Dunia II membawa Jepang pada keharusan memenuhi tuntutan para pemenang perang. Pasca menyerahnya Jepang pada Sekutu, negara tersebut segera berada dalam kendali Amerika Serikat melalui pemerintahan sementara SCAP (*Supreme Commander Alliance on Pacific*) dibawah perwakilan Jendral Douglas MacArthur.

Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara ini dihadapkan pada tuntutan besar untuk memetakan dan menjalin hubungan antarnegara dengan tetap berpegang pada alur politik luar negeri Jepang yang bersesuaian dengan Konstitusi Demokrasi 1947. Pertahanan Jepang yang didasarkan pada pasal 9 dari konstitusi yang diterbitkan pada tahun 1947, Konstitusi yang dibuat ditujukan agar Jepang tidak lagi mempunyai potensi untuk dapat memulai perang dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata Jepang baik darat, laut dan udara serta potensi perang lainnya yang ada pasca perang, dan untuk mencegah penggunaan

kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian/konflik internasional.

Sebagai gantinya AS memberikan jaminan perlindungan dan juga payung kemanan terhadap Jepang dari serangan luar yang datang dan akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerang balik, hal tersebut tertuang dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960, yang merupakan revisi dari Perjanjian Mutual Security Assistance Pact yang ditandatangani pada tahun 1952, dimana Jepang memperbolehkan AS untuk membuat pangkalan dan menempatkan pasukannya di dalam wilayah Jepang. Akan tetapi, tidak seperti perjanjian pertahanan lainnya, perjanjian yang dibuat tidak bersifat seimbang yang menempatkan Jepang pada posisi yang lebih pasif, dimana Jepang tidak berbuat sebaliknya jika AS diserang oleh kekuatan lain.

Isi dari pasal 9 terutama pada poin yang kedua menunjukkan perkuatan kapabilitas pertahanan Jepang dan beberapa pencapaiannya merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Hal ini semakin signifikan, ketika Jepang

pada bulan Mei 2008 meluluskan undang-undang untuk menggunakan ruang angkasa untuk kepentingan pertahanan. Ini merupakan kebalikan dari undang-undang pertahanan Jepang. Melihat kondisi regional Asia Timur yang ada, pemerintah Jepang perlu melakukan peningkatan pada program politik kemanannya. Peningkatan tersebut pada akhirnya terlihat dalam rincian National Defense Program Guidelines (NDPG) yang menjadi panduan pertahanan Jepang pada tahun 2010 dengan munculnya konsep Dynamic Defense Force (DDF). Konsep ini memungkinkan Jepang untuk membentuk pasukan SDF yang lebih agresif dan mobilitatif. NDPG 2010 juga memuat rancangan untuk memperkuat maritim dan angkatan udara Jepang untuk menghadapi konflik yang berbentuk serangan dari luar Jepang.

Perubahan politik keamanan Jepang ini menjadi semakin menarik dengan kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang semenjak Desember 2012. Kebijakan pada masa Abe adalah memperketat peran Jepang dibidang politik dan militer. Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan mainstreaming campaign di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan situasi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi re-interpretasi Pasal 9. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Melakukan upaya aktif untuk mendorong demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama Jepang-ASEAN untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di wilayah Indocina, termasuk dalam hal membangun forum untuk mendesain strategi pembangunan yang komprehensif.

Strategi Keamanan Nasional Jepang yang dirilis tanggal 17 Desember 2013 menyebut bahwa situasi keamanan Jepang “bertambah darurat”. Namun perlu

diingat bahwa deskripsi ini berakar dari sikap China yang agresif di Laut Cina Timur, khususnya menyangkut sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan Abe seperti peninjauan ulang terhadap klausa perdamaian Konstitusi, pembentukan Dewan Keamanan Nasional, dan peningkatan anggaran pertahanan dengan rencana lima tahun pembangunan, semata-mata diambil untuk menanggulangi kebutuhan pertahanan Jepang, juga untuk menghadapi perubahan kondisi geopolitik dan keamanan di Asia Timur Laut. Dengan berbagai inisiatif tersebut, tujuan dari kebijakan pemerintahan Abe, yakni untuk memelihara kemampuan pertahanan yang dapat dipercaya di tengah makin agresifnya China, dan bukan untuk “kembali pada militerisme”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (HB Sutopo, 2006:133) dalam bukunya berjudul “Metode Penelitian Kualitatif yang berfokus pada studi pustaka”, telah dinyatakan bahwa : “Didalam sebuah penelitian yang berorientasi pada studi pustaka, kelengkapan referensi menjadi parameter utama di dalam memetakan arah dan alur dari pengkajian data lebih dalam. Penelitian kualitatif merupakan salah satu upaya mencari kebenaran yang dapat diandalkan. Penelitian jenis ini dilakukan secara ilmiah melalui pengumpulan analisis data diskriptif dari berbagai sumber literatur, para pakar maupun buku-buku penunjang. Dalam hal ini, menggambarkan perkembangan keamanan militer Jepang. Serta bagaimana kebijakan keamanan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe melalui data-data yang dihimpun dari studi kepustakaan yang sesuai dengan topic terkait dan termasuk penelitian terdahulu untuk mempermudah penulis dalam mengaji sebuah topik. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder dimana data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi pustaka, sumber lainnya adalah jurnal, referensi buku serta website terkait dengan kebijakan keamanan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah Kebijakan

Keamanan Jepang dimana penelitian ini dilakukan pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2012-2014. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka secara manual maupun *onlineresmi* dari institusi yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya

Penelitian ini Analisa data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam model analisa ini terdapat tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jepang pada mulanya berangkat dari masyarakat agricultural yang sedikit demi sedikit, dengan adanya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan seperti reformasi agraria dan perburuhan, telah beralih pada masyarakat industri. Namun, kultur politik pemerintah Jepang yang semi-otoritarian atas warisan yang terjadi pada masa Perang Dunia ke-2 tidak serta merta memberikan dampak yang positif terhadap industrialisasi dan peran penyejahteraan masyarakat Jepang secara keseluruhan. Dari sinilah kemudian system *zaibatsu* (industri dan bisnis keuangan) berkembang dengan pesat. Terpusatnya berbagai kegiatan ekonomi terhadap beberapa kelompok masyarakat menjadi tren perekonomian yang berkembang di Jepang. Dibawah kepemimpinan PM Ikeda, Jepang merumuskan strategi yang disebut dengan ‘Rencana Pelipatgandaan Penghasilan’ (*incoming-doubling plan*). Strategi ini direspon dengan pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning Agency/EPA*). Jepang mulai melakukan perubahan dan proses mempercepat pertumbuhan menyeluruh pada dekade tahun 1970-an. Proses sejarah yang dibangun secara sosial antara masyarakat, bisnis dan pemerintah Jepang menjadi pelajaran yang baik bagi dasar peletakkan pemerintah Jepang dalam mengatur perekonomiannya. Ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang ini dimulai dari disadarinya bahwa

produksi di luar negeri lebih efisien dibandingkan dengan melakukan produksi di dalam negeri. Terakhir adalah dikenalkannya peningkatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pasar keuangan Jepang yang diambil dari pasar internasional. Sistem politik di Jepang, sama dengan keamanannya, didasarkan atas konstitusi 1947 yang dibuat pasca Perang Dunia II oleh *Supreme Allied Command Force*. Sistem tersebut menganut asas demokrasi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan tiga badan yang berdiri secara terpisah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri, yang secara berdampingan melakukan *check and ballance* terhadap performa masing-masing pihak. Sementara legislatif berhak mengangkat perdana menteri, eksekutif berhak pula membubarkan parlemen. Perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan, merupakan sosok yang penting karena menjadi wajah bagi pemerintahan. Di Jepang sendiri telah menganut sistem parlementer. Pertama, parlemen memiliki hak untuk mengajukan mosi tidak percaya pada perdana menteri (<http://www.kantei.go.jp> diakses pada 20juni2015 pada pukul 15.00 WIB) Dengan kata lain, parlemen memiliki wewenang untuk memberhentikan perdana menteri dari jabatannya apabila perdana menteri tersebut dirasa tidak lagi mampu ataupun gagal dalam kepemimpinannya.

Perubahan dalam kebijakan pertahanan Jepang tersebut dimulai ketika terjadi Perang Teluk pada tahun 1990-1991, dimana AS dan sekutu mendorong Jepang untuk ikut berkontribusi dan memberikan bantuan berupa personel militer, dana dan juga perlengkapan dalam krisis tersebut. Atas dorongan yang kuat tersebut, akhirnya Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan finansial sebesar 13 milyar US Dolar, tanpa mengirimkan pasukannya ke wilayah konflik, karena legislasi yang diharapkan menjadi dasar hukum untuk mengirimkan pasukan SDF ke wilayah Teluk tidak berhasil disahkan karena kurangnya dukungan di Parlemen. Berakhirnya Perang Dingin tidak menjadi jaminan turut berakhir pula masalah keamanan di kawasan Asia Timur. Jepang menyadari

bahwa kerangka multilateralisme yang tengah diperjuangkannya belum dapat menggantikan kerjasama keamanan bilateral yang diberikan dalam kerangka aliansi keamanan AS-Jepang. Kejadian pada Perang Teluk, dan kemudian disusul dengan krisis Semenanjung Korea pada tahun 1993, memberikan sinyal bahwa Jepang telah gagal dalam merespon panggilan AS untuk memberikan bantuan dalam krisis keamanan yang terjadi, yang dapat meruntuhkan kepercayaan dalam aliansi AS-Jepang yang saat itu tengah melemah di antara keduanya. Hal tersebut kemudian mendorong Jepang untuk memperkuat aliansi keamanan AS-Jepang.

Kebijakan pertahanan Jepang pasca perang diwarnai oleh kebijakan pasifis yang dihasilkan atas pembatasan dari konstitusi Jepang, terutama pasal 9 (<http://www.mod.go.jp/e/dpolicy> diakses pada 12 Juni 2015) : Pasal 9 ayat 1 : (Dengan menjunjung tinggi perdamaian internasional yang berdasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai sebuah hak berdaulat dari bangsa dan penggunaan ancaman atau kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Pasal 9 ayat 2 : Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta potensi kekuatan perang lainnya tidak dimiliki. Selain itu hak negara untuk berperang tidak akan diakui.) Demi terwujudnya perdamaian dunia, maka pada kalimat terakhir pasal ini dikatakan bahwa dengan dalih apapun hak yang dimiliki Jepang, yaitu *The Right of belligerency* (hak berperang) tidak akan pernah diakui. Oleh karena itu, pernyataan perang dari pemerintah tidak akan dikenal.

Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan pandangan dan pernyataan resminya terhadap Konstitusi 1947, khususnya Pasal 9. Pandangan tersebut menegaskan bahwa perang yang dimaksud dalam pasal 9 adalah perang agresi, SDF bukanlah potensi perang karena hanya digunakan untuk operasi-operasi pertahanan dan dengan mempertimbangkan situasi internasional saat ini, Jepang tetap akan bekerjasama dengan AS dalam bidang pertahanan keamanan. Pandangan-pandangan

pemerintah Jepang tersebut diatas dapat dikatakan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 9 Konstitusi 1947. Sehingga apabila ada suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selaras dengan Konstitusi, khususnya Pasal 9 maka akan diadakan penyesuaian dengan jalan menginterpretasi atau bahkan interpretasi ulang (re-interpretasi) terhadap Konstitusi khususnya Pasal 9 tersebut.

Kebijakan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi dan militer. Ekonomi dibagi menjadi 3: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Reformasi Struktural. Upaya Jepang yang bersifat *Soft Diplomacy* ini terlihat dalam konflik Senkaku walaupun konflik tersebut belum juga terselesaikan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral kedua negara disela-sela pertemuan APEC yang diselenggarakan di Beijing bulan November. Setidaknya ada tiga alasan mendasar bagi terwujudnya pertemuan antara Shinzo Abe dan Xi Jinping (<http://thedi diplomat.com/2014/11/japan-and-china-get-to-yes-on-an-abe-xi-submit/> diakses pada 4 Juli 2015 pukul 11.00). Jepang mempunyai kepentingan dalam ekonomi adalah dimana Jepang bisa dengan mudah masuk ke dalam pasar China untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi yang memberikan efek jangka panjang terhadap ekonomi Jepang. Militer : Basic Defense Force concept menjadi Dynamic Defense Force, Doktrin "*Basic Defense Force Concept*" yang dibuat pada tahun 1976 berubah menjadi "*Dynamic Defense Force*" pada NDPG terbaru ini. NDPG tersebut membangun kekuatan militer Jepang yang dapat secara efektif merespon berbagai ancaman keamanan yang ada saat ini termasuk ancaman militer China dan Korea Utara. Membangun kekuatan militer yang besar sangat diutamakan karena untuk mengoptimalkan waktu secara efisien daripada mengandalkan peringatan yang ada dalam menangkal ancaman (*Japan Ministry of Defense 2010*). (<http://www.kantei.go.jp/foreign/decisions/> 2010. diunduh pada 1 september 2015 pada pukul 22.50 WIB). Faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan

pertahanan Jepang : 1. Meningkatnya kemampuan ekonomi Jepang. 2. Nasionalisme. 3. Nuklir dan Rudal Korea Utara sebagai ancaman. 4. Peningkatan militer China. Sedangkan kepentingan AS dalam mendorong kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang adalah : a) Stabilitas Kawasan Asia Timur b) Extended Deterrence AS terhadap Kekuatan Militer China dan Korea Utara c) Pengamanan Jalur Perdagangan AS di Asia Timur. Penentangan terhadap Dynamic Defense Force yaitu yang pertama China, China yang melayangkan protes apabila kapabilitas militer Jepang bertambah atau terjadinya kerjasama keamanan Amerika Serikat - Jepang yang lebih erat (<http://gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP3-Xu.pdf>). Yang kedua adalah Korea Utara, pada dasarnya pertumbuhan pertahanan Jepang kuat dipengaruhi oleh ancaman yang datang dari Korea Utara.

Sedangkan upaya-upaya Shinzo Abe dalam meningkatkan pertahanan Jepang dibagi menjadi 3, adalah: 1. Bekerjasama dengan ASEAN untuk meredam pengaruh China di kawasan, Perdana Menteri Shinzo Abe, melakukan upaya memperkuat diplomasi Asia dengan terlebih dahulu mengunjungi Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan Australia adalah menggambarkan mengenai kepentingan ekonomi dan strategis pemerintahan baru di Tokyo. Jepang ingin meredam kebangkitan Chinayang ditandai oleh kebangkitan militer dan pengaruh perekonomiannya di Asia Tenggara. 2. Re-Interpretasi Pasal 9, Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari perjanjian pasifis yang disebut Pasal 9. Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan kampanye di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan kondisi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi re-interpretasi Pasal 9. Meningkatkan keterbukaan perekonomian Asia Pasifik demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan. Beberapa negara seperti Australia, India, Filipina dan

Viet Nam telah mulai melakukan kerjasama di bidang industri pertahanan Jepang. Sebagai *follow-up* hasil kunjungan PM Shinzo Abe di Australia Juli 2014, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan kapal selam kelas Soryu buatan Jepang yang disebut sebagai salah satu kapal selam konvensional (*diesel-powered*) terbaik di dunia.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Shinzo Abe tersebut, maka Shinzo Abe sendiri telah menghasilkan kebijakan pada masa pemerintahannya. Salah satu upaya Jepang untuk meningkatkan keterbukaan perekonomian di kawasan Asia Pasifik, bekerjasama dengan ASEAN, serta Re-Interpretasi Pasal 9 maka Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe adalah kebijakan Jepang untuk ikut serta meningkatkan militernya untuk melindungi keamanan nasionalnya, jadi upaya Jepang ini melahirkan kebijakan yang diharapkan Jepang dapat mencapai kepentingan dan keamanan nasionalnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Kebijakan peningkatan militer Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe adalah dengan menggunakan konsep *Dynamic Defense Force*, konsep ini muncul pada tahun 2010.; (2) Jepang mengubah doktrin pertahanannya yang lama dan mengganti dengan buku putih pertahanan yang baru. Perubahan yang terjadi adalah dengan digantikannya "*Basic Defense Force Concept*" menjadi "*Dynamic Defense Force*". Yang artinya bahwa Jepang diminta aktif dalam keamanan kawasan, dan tidak hanya sekedar berlindung pada kekuatan militer Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, antara lain : terkait dengan keinginan AS menjaga kawasan Asia Timur dari kekuatan militer Korea Utara mengancam kepentingan AS pada kawasan Jepang, Hubungan aliansi militernya bersama Jepang, Kepentingan masa depan AS sendiri dalam menjaga jalur perdagangan di kawasan Asia secara keseluruhan.

Kebijakan-kebijakan pertahanan yang telah dikeluarkan oleh Abe di latar

belakangi kondisi regional di Asia Timur yang semakin tidak aman. Terutama terkait dengan perihal sengketa dengan China dan Korea Utara. Hal ini sesuai dengan meningkatnya kekhawatiran rakyat Jepang terhadap kedua negara tersebut. Upaya yang dilakukan Shinzo Abe antara lain, sebagai berikut : Bekerjasama dengan ASEAN untuk meredam pengaruh China di kawasan, Re-Interpretasi Pasal 9, Meningkatkan keterbukaan perekonomian Asia Pasisik demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Dari kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai strategi Jepang di tengah meningkatnya kekuatan China di bidang keamanan: (2) Perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai dampak peningkatan keamanan militer Jepang dikawasan Asia Timur pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Daftar Pustaka

Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta :UNS PRESS.

(<http://www.kantei.go.jp> diakses pada 20 juni 2015 pada pukul 15.00 WIB)

(<http://www.mod.go.jp/e/dpolicy> diakses pada 12 Juni 2015)

(<http://thediplomat.com/2014/11/japan-and-china-get-to-yes-on-an-abe-xi-submit/>)

(<http://www.kantei.go.jp/foreign/decisions/2010>. diunduh pada 1 september 2015 pada pukul 22.50 WIB).

(<http://gwu.edu/~sigur/assets/docs/scap/SCAP3-Xu.pdf>)